

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU KEJAHATAN DI DALAM PESAWAT
UDARA DITINJAU BERDASARKAN
KETENTUAN HUKUM PIDANA**

SKRIPSI



**Oleh:
Nofendri Pratama Putra
140710098**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU KEJAHATAN DI DALAM PESAWAT
UDARA DITINJAU BERDASARKAN
KETENTUAN HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Nofendri Pratama Putra
140710098**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 12 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,

Nofendri Pratama Putra
140710098

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU KEJAHATAN DI DALAM
PESAWATUDARA DITINJAU BERDASARKAN
KETENTUAN HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh:
Nofendri Pratama Putra
140710098**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 12 Februari 2019

**Lenny Husna, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berciri nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tuntutan dalam hal sarana transportasi yang relatif lebih cepat, salah satunya yaitu melalui udara yang menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Sehubungan dengan itu, maka peran pesawat udara selaku alat transportasi akan menjadi alternatif yang strategis, namun demikian pertumbuhan transportasi udara juga dapat disalahgunakan oleh sebagian pihak dengan melakukan perbuatan melanggar hukum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana di dalam pesawat udara berdasarkan ketentuan hukum pidana dan juga untuk mengetahui kebijakan penanggulangan tindak pidana penerbangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan deskriptif analitis. Dari penelitian ini penulis menemukan bahwa barang siapa dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun sesuai dengan pasal 479l KUHP. Adapun bentuk penanggulangan tindak pidana penerbangan di Indonesia melalui prosedur tetap pengamanan perusahaan pengangkutan udara yang sesuai dengan Keputusan Menteri KM.73 Tahun 1996 tentang pengamanan penerbangan sipil dan juga pelaksanaan prosedur pemeriksaan penumpang yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara SKEP/2765/XII/2010 yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan keamanan penumpang.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana di Dalam Pesawat

ABSTRACT

The unitary state of Republic Indonesia is an archipelagic country characterized by an archipelago which is united by territorial waters and air with the boundaries, rights and sovereignty stipulated by the act. As an archipelagic country, Indonesia has demands in terms of transportation facilities that are relatively faster, one of which is through air, which is necessity cannot be ignored. In connection with that, the role of airplanes as a means of transportation will be a strategic alternative. However, the growth of air transportation can also be misused by some people by violating the law. This research was conducted to find out the term of accountability of criminal offenders in airplane based on the provisions of criminal law and also to know the policy of aviation crime in Indonesia. The study uses normative and analytical descriptive research methods. From this study the authors found that anyone in the airplane with the act unlawful appropriation or seize or retain control of aircraft in flight shall be imprisoned for twelve years in accordance with Article 479l of the Criminal Code. The form of aviation crime in Indonesia through the fixed procedure of securing air transport companies in accordance with Ministerial Decree KM.73 of 1996 concerning civil aviation security and also the implementation of passenger inspection procedures in accordance with the Director General of Civil Aviation SKEP/2765/XII/2010 which regulates procedures for checking passengers security.

Keywords: Criminal Responsibility, Criminal Acts On The Plane

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd. selaku Dekan Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Ibu Lenny Husna S.H., M.H.. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Ibu Rizky Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
6. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat hukum;

7. Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn. selaku dosen pengampu mata kuliah hukum agraria;
8. Bapak Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H. selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian hukum;
9. Ibu Irene Syinarky, S.H., M.Kn. selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum;
10. Bapak Daria, S.Sy., M.H. selaku dosen pengampu mata kuliah hukum acara PTUN.
11. Bapak Radius, S.H., M.H. sebagai dosen prodi ilmu hukum;
12. Bapak Zuhdi Arman, S.H., M.H. sebagai dosen prodi ilmu hukum;
13. Bapak Zulkifli S.H., M.H. sebagai dosen prodi ilmu hukum;
14. Dosendan Staff Universitas Putera Batam;
15. Indah Lookita Puspagalih, S.Ak sebagai penyemangat;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan tugas akhir ini.

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan selalu mencurahkan rahmat dan karuniaNya. Amin.

Batam, 12 Februari 2019

Nofendri Pratama Putra

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Perumusan Masalah.....	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kerangka Teoritis	9
2.1.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana	9
2.1.2 Tindak Pidana	12
2.1.3 Definisi Hukum Pidana.....	13
2.1.4 Definisi Kejahatan secara Ilmu Hukum.....	17
2.1.5 Definisi Pesawat Udara.....	20
2.2 Kerangka Yuridis	24
2.2.1 KUHP Tentang Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan ..	24
BAB III	30
METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
3.2 Metode Pengumpulan Data	33
3.2.1 Jenis Data.....	33
3.2.2 Alat Pengumpulan Data	34

3.3 Metode Analisis Data	35
3.4 Penelitian Terdahulu.....	35
BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Di Dalam Pesawat Udara Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana.....	41
4.2 Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia.....	59
BAB V.....	65
KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69